

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hoogerwerf, *Politikologi*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985
- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990
- Aditya Rakatama, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Kejaksaan*, Semarang, 2008.
- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2003
- Cornelis Lay, *State Auxiliary Agencies Komisi Negara*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2006
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990,
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005
- Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum, bahan ajar mata kuliah teori hukum, program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2008
- George Ritzer & Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2007
- Hendra Nurtjahya, *Filsafat Demokrasi* Bumi Aksara, Jakarta, 2006

- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Ba Bandung, 1994
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Jimly, Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Setjen & Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006
- Kusnardi Muh. dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 1983
- M. Marwan & Jimmly, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- _____, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Modern*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Padmo Wahyono, *Indonesia Ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2001.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998
- Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Stout HD, *De Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

B. Jurnal

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bermanfaat dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Choky R. Ramadhan, “Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan”, *Media Hukum dan Peradilan: Teropong*, Volume 1, MaPPI FH UI. 2013,

Ferdinand T. Andi Lolo, *Membangun Sinergi dan Kemitraan Strategis antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*”, MaPPI FH UI, Badan Penerbit FH UI, 2015.

Harkrisnowo, Harkristuti *Komisi Pengawas Eksternal Kejaksaan Mengerosi Kewenangan ataukah Mendorong Profesionalisme*, Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya tentang Komisi Pengawas Kejaksaan, diselenggarakan oleh *Partnership for Governance Reform in Indonesia* di Jakarta, 2004.

Hoessein, B.. “Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”; *Seminar Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara. 2001

Marwan Effendy, *pengawasan sebagai instrumen perwujudan organisasi kejaksaan RI yang bersih dan berwibawa*, materi disampaikan dalam ceramah pengarahan peserta diklat Pim angkatan II dan IV kejaksaan RI tahun 2011, Jakarta 2 November 2011.

Seminar Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 8 november 2018, di sampaikan oleh Sumarno, S.H. MH.CFrA. Komisi Ketua Kejaksaan RI, judul seminar: Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Samuel Hamonangan Simanjuntak. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Jurnal. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli - Desember 2019

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2003.

_____, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi* dalam Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 3, September 2006.

Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990.

Samuel Hamonangan Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli - Desember 2019.

Trimedya panjaitan, *Komisi Kejaksaan Antara Harapan dan Tantangan, Makalah disampaikan dalam Seminar Eksistensi Komisi Kejaksaan Dalam Penegakan Pengawasan Kejaksaan*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945

_____, Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

_____, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan

_____ Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.

D. Website/Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5e0d680832ee8/perbedaan-delegasi--dan-mandat/>. Kamis, 02 January 2020. (Di akses pada tanggal 11 November 2020)